

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- A. Zainal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Adam Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- _____. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2022. *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

- Direktorat Hukum. 2021. *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- F. Ijswara. 2014. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Binacipta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2012. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kadaruddin. 2020. *Asset Recovery Hasil Kejahatan Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Kerjasama Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laode M. Syarif dan Didik Endro Purwoleksono, ed. 2015. *Hukum Antikorupsi*. Jakarta: United State Agency for International Development.
- Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muh. Afdal Yanuar. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Muntaha. 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Tim Garda Tipikor. 2016. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Yunus Husain. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

TESIS

Ahmad Arif Hidayat. 2023. *Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Muhammad Fuad Azwar R. 2023. *Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Kebijakan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Muhammad Yodi Nugraha. 2023. *Tinjauan Yuridis Konsep Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rahmadhani Nurfitriana M. 2021. *Perampasan Aset Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana dalam kaitannya dengan Pencucian Uang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

JURNAL

Amir Ilyas. 2011. *Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan Money Laundry*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. 19 (3).

Muhammad Rivai S, Hijrah Adhyanti Mirzana, dan Audyna Mayasari Muin. 2022. *Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Tumou Tou Law Review 1 (2).

Refki Saputra. 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*. Jurnal Integritas KPK 3 (1).

Syarif Saddam Rivanie, et.al. 2022. *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*. Jurnal Halu Oleo Law Review. 6 (2).

WEBSITE

Komisi III, *RUU Perampasan Aset Bakal Beri Efek Jera ke Pelaku Kejahatan Ekonomi*, 23 Mei 2023, Artikel <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44599/t/RUU+Perampasan+As+et+Bakal+Beri+Efek+Jera+ke+Pelaku+Kejahatan+Ekonomi> diakses tanggal 20 September 2023 pukul 13.55 WITA.

Nada Naurah, *Menilik Kasus Pencucian Uang di Indonesia, Ini Statistiknya!*, 1 Maret 2023, Artikel <https://goodstats.id/article/menilik-kasus-pencucian-uang-di-indonesia-ini-statistiknya-lonv4> diakses tanggal 19 September 2023 pukul 22.40 WITA.

Riri Rahayu, *5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPAK Duga Capai RP 183,88 T*, 15 Februari 2023, Artikel <https://bisnis.tempo.co/read/1691688/5-tindak-pidana-pencucian-uang-terbesar-di-indonesia-ppak-duga-capai-rp-18388-t> diakses tanggal 19 September 2023 pukul 22.10 WITA.

Website http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara diakses tanggal 8 Maret 2024 pukul 10.00 WITA.

Website <https://kbbi.web.id/bijak> diakses tanggal 21 September 2023 pukul 12.00 WITA.

Website <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/72> diakses tanggal 21 September 2023 pukul 10.04 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana).

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI.